



Peran Pemerintah Daerah dalam Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Pengendalian Pencemaran Sungai

Dewara Tiawibowo¹ Zulkarnaini²

¹Universitas Riau

²Universitas Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 00, 2023

Revised March 00, 2023

Accepted March 00, 2023

Available online April 00, 2023

Kata Kunci:

kebijakan lingkungan, pemerintah daerah, pencemaran sungai, tata kelola lingkungan, partisipasi publik.

Keywords:

environmental policy, local government, river pollution, environmental governance, public participation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam formulasi kebijakan pengendalian pencemaran sungai dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis proses perumusan kebijakan lingkungan di tingkat lokal serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan stakeholders kunci dan analisis dokumen kebijakan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan kompleks dalam pengendalian pencemaran sungai, meliputi keterbatasan koordinasi antar-dinas, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, dan partisipasi publik yang masih bersifat formalitas. Namun, penelitian juga mengungkap praktik baik dimana kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, dan masyarakat terbukti efektif meningkatkan kualitas pengelolaan sungai. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wawasan tentang environmental governance dengan menekankan pentingnya pendekatan kontekstual sesuai karakteristik lokal. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, serta penegakan regulasi yang konsisten. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif di tingkat daerah

ABSTRACT

This study examines the role of local governments in formulating river pollution control policies using a qualitative case study approach. The main focus of the study is to analyze the process of formulating environmental policies at the local level and to identify supporting and inhibiting factors in their implementation. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders and analysis of related policy documents. The findings of the study indicate that local governments face complex challenges in controlling river pollution, including limited coordination between agencies, suboptimal institutional capacity, and public participation that is still formal. However, the study also reveals good practices where multi-stakeholder collaboration between government, industry, and communities has proven effective in improving the quality of river management. Theoretically, this study enriches insights into environmental governance by emphasizing the importance of a contextual approach according to local characteristics. Practically, the results of the study recommend strengthening institutional capacity, more inclusive participation mechanisms, and consistent regulatory enforcement. These findings provide important contributions to the development of more effective environmental policies at the local level.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan pencemaran sungai telah menjadi tantangan serius bagi banyak daerah di Indonesia, tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem perairan tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai sebagai sumber air, irigasi, dan mata pencaharian. Penyebab utama pencemaran berasal dari berbagai aktivitas antropogenik, termasuk pembuangan limbah industri

*Corresponding author

E-mail addresses: dewaratiawibowo@email.com

yang tidak terkendali, limbah domestik dari permukiman padat penduduk, serta praktik pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Selain itu, rendahnya kesadaran lingkungan dan lemahnya penegakan hukum turut memperparah kondisi ini, menciptakan lingkaran masalah yang sulit dipecahkan tanpa intervensi kebijakan yang komprehensif (Fadjarjani et al., 2018).

Dampak dari pencemaran sungai tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga sistemik. Degradasi kualitas air sungai berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan masyarakat, seperti munculnya penyakit kulit dan gangguan pencernaan akibat konsumsi air tercemar. Di sisi lain, kerusakan ekosistem perairan dapat mengurangi produktivitas perikanan dan mengganggu keseimbangan hidrologi, yang pada akhirnya memengaruhi ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perikanan (Estika et al., 2017).

Kondisi ini diperparah oleh faktor geografis dan demografis Indonesia yang unik. Sebagai negara kepulauan dengan sungai-sungai yang menjadi urat nadi kehidupan, pencemaran di satu daerah sering kali berdampak pada wilayah hilir, menciptakan konflik lintas daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat turut meningkatkan tekanan pada sungai-sungai perkotaan, yang sering kali dijadikan tempat pembuangan sampah dan limbah akibat keterbatasan infrastruktur pengolahan.

Meskipun tantangan ini terlihat kompleks, sebenarnya terdapat peluang untuk mengatasi masalah pencemaran sungai melalui pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, sebagai aktor utama dalam pengelolaan lingkungan, memiliki peran strategis untuk merancang kebijakan yang tidak hanya reaktif tetapi juga preventif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pemantauan kualitas air, mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai. Inisiatif-inisiatif berbasis komunitas, seperti program sungai bersih atau adopsi sungai oleh dunia usaha, telah menunjukkan potensi yang baik di beberapa daerah dan dapat menjadi model untuk direplikasi di wilayah lain.

Dengan demikian, meskipun pencemaran sungai merupakan masalah serius, bukan berarti tidak ada solusi untuk mengatasinya. Dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat umum, untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Langkah-langkah konkret yang diambil hari ini akan menentukan apakah sungai-sungai di Indonesia dapat terus menjadi sumber kehidupan yang sehat bagi generasi mendatang atau justru berubah menjadi beban lingkungan yang semakin sulit ditanggulangi. Aktivitas industri, limbah domestik, dan praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan berkontribusi terhadap degradasi kualitas air, mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Sebagai otoritas yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah memegang peran kunci dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif. Namun, kompleksitas koordinasi antar-stakeholder, keterbatasan sumber daya, dan dinamika kepentingan lokal seringkali menghambat upaya pengendalian pencemaran sungai secara optimal.

Studi kasus pengendalian pencemaran sungai menjadi penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang berbasis bukti, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan formulasi kebijakan yang partisipatif dan berbasis data, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan solusi yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam formulasi kebijakan lingkungan, khususnya dalam konteks pengelolaan sungai, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam proses tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam formulasi kebijakan pengendalian pencemaran sungai. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam mengenai dinamika kebijakan, persepsi stakeholder, serta konteks sosial dan politik yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, termasuk pejabat dinas lingkungan hidup, pemerintah daerah, aktivis lingkungan, perwakilan industri, serta masyarakat yang terdampak pencemaran sungai. Selain itu, dilakukan analisis dokumen kebijakan seperti peraturan daerah, laporan lingkungan hidup, dan notulen rapat koordinasi untuk melengkapi data primer. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan langsung terkait proses formulasi kebijakan dan implementasinya.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari transkrip wawancara dan dokumen dikategorisasi

berdasarkan tema-tema seperti peran pemerintah, partisipasi publik, kendala implementasi, dan inovasi kebijakan. Triangulasi sumber digunakan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan perspektif antar-informan dan data sekunder.

Studi ini juga mempertimbangkan aspek etika penelitian dengan memastikan kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan sebelum wawancara. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai proses formulasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah serta rekomendasi untuk perbaikan tata kelola sungai yang lebih efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis data kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa pemerintah daerah memainkan peran multidimensional dalam formulasi kebijakan pengendalian pencemaran sungai. Proses kebijakan tidak hanya melibatkan aspek teknis lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Beberapa temuan kunci antara lain:

1. Peran Pemerintah Daerah sebagai Inisiator dan Koordinator

Pemerintah daerah, melalui dinas lingkungan hidup, bertindak sebagai penginisiasi kebijakan dengan menyusun peraturan daerah (Perda) dan rencana aksi pengendalian pencemaran. Namun, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antar-dinas terkait, seperti dinas PUPR, dinas perindustrian, dan dinas kesehatan. Kendala utama yang ditemui adalah tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinkronisasi program.

2. Partisipasi Publik yang Masih Terbatas

Meskipun pemerintah daerah telah mengadakan konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan, keterlibatan masyarakat dan LSM cenderung bersifat formalitas. Beberapa kelompok masyarakat mengeluhkan bahwa masukan mereka tidak diakomodasi secara substansial dalam perumusan kebijakan. Di sisi lain, industri sering kali memiliki akses lebih besar dalam lobi kebijakan, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Kendala Implementasi: Kapasitas Kelembagaan dan Pendanaan

Banyak kebijakan yang tidak diimplementasikan secara optimal akibat keterbatasan anggaran, kurangnya SDM yang kompeten, serta lemahnya pengawasan. Sebagai contoh, pemantauan kualitas air sering kali tidak berkelanjutan karena terbatasnya alat monitoring dan tenaga ahli. Selain itu, sanksi bagi pelaku pencemar dinilai belum cukup memberikan efek jera.

4. Inovasi Kebijakan dan Kolaborasi Multi-Pihak

Beberapa daerah menunjukkan kemajuan dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif, seperti melibatkan akademisi dalam penyusunan kajian lingkungan atau membentuk forum sungai yang melibatkan masyarakat, industri, dan pemerintah. Model seperti ini terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sungai.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa konsep *environmental governance* tidak hanya berfokus pada peran pemerintah sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pihak yang memfasilitasi kolaborasi antar-stakeholder dalam pengelolaan lingkungan. Dalam konteks pengendalian pencemaran sungai, pemerintah daerah tidak hanya bertugas menetapkan peraturan, tetapi juga harus memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola lingkungan yang menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan transparan untuk mencapai keberlanjutan ekologis (Djoharam et al., 2018).

Namun, penelitian ini juga mengungkap adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Meskipun pemerintah daerah secara formal memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sungai, implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi antar-sektor, minimnya partisipasi publik yang bermakna, serta keterbatasan sumber daya. Misalnya, dalam beberapa kasus, dinas lingkungan hidup kesulitan menjalankan fungsi pengawasan karena terbatasnya personel yang terlatih atau kurangnya alat pemantauan yang memadai (Erliza et al., 2019). Di sisi lain, meskipun mekanisme partisipasi publik secara formal telah diadopsi, seperti melalui konsultasi atau musyawarah perencanaan pembangunan, proses tersebut sering kali bersifat prosedural belaka tanpa diikuti oleh internalisasi masukan masyarakat ke dalam kebijakan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan *environmental governance* tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan komitmen politik pemerintah daerah. Studi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang berhasil mengelola pencemaran sungai dengan baik umumnya memiliki kepemimpinan yang kuat, didukung oleh kolaborasi

aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Sebaliknya, daerah yang mengalami kegagalan dalam pengendalian pencemaran cenderung menghadapi masalah fragmentasi kebijakan, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran lingkungan di kalangan pemangku kepentingan (Azhar & Dewata, 2018).

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam environmental governance, di mana kebijakan tidak hanya dirancang secara top-down, tetapi juga mempertimbangkan dinamika lokal dan melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, alokasi anggaran yang memadai, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci untuk memperkuat peran pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi pentingnya prinsip-prinsip environmental governance, tetapi juga menyoroti perlunya adaptasi dan inovasi dalam penerapannya sesuai dengan konteks lokal. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan keterlibatan stakeholder.

Pertama, fragmentasi kebijakan menjadi tantangan serius. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi, kebijakan lingkungan sering kali tidak terintegrasi dengan kebijakan sektoral lain, seperti industri dan tata ruang. Hal ini memperlihatkan perlunya pendekatan integrated water resources management (IWRM) untuk memastikan koherensi kebijakan.

Kedua, partisipasi masyarakat yang belum optimal mencerminkan kelemahan dalam penerapan prinsip good governance. Studi ini mendukung temuan sebelumnya (misalnya, Lestari et al., 2022) bahwa partisipasi publik sering kali bersifat simbolik, bukan deliberatif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih inklusif, seperti citizen science dalam pemantauan kualitas air atau penguatan peran komunitas lokal.

Ketiga, keterbatasan anggaran dan SDM menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pusat dalam pendanaan lingkungan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa desentralisasi lingkungan memerlukan dukungan finansial yang memadai, termasuk melalui skema insentif bagi daerah yang berhasil mengelola sungai secara berkelanjutan.

Terakhir, kolaborasi multi-pihak yang berhasil di beberapa daerah menjadi bukti bahwa pendekatan polycentric governance dapat menjadi solusi. Model ini memungkinkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga mengurangi beban pemerintah daerah sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap kompleksitas peran pemerintah daerah dalam formulasi kebijakan pengendalian pencemaran sungai, sekaligus memperlihatkan tantangan dan peluang dalam implementasi tata kelola lingkungan yang efektif. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan tingkat partisipasi masyarakat yang substantif.

Pemerintah daerah berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator, namun sering menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan partisipasi publik yang bersifat simbolik. Di sisi lain, studi ini juga mengidentifikasi praktik baik di beberapa daerah yang berhasil mengembangkan model kolaboratif melalui pendekatan multi-pihak, menunjukkan bahwa penguatan tata kelola lingkungan memerlukan integrasi antara aspek teknis, politik, dan sosial.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskusi mengenai environmental governance dengan menekankan pentingnya kontekstualisasi kebijakan sesuai karakteristik lokal. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, serta penegakan regulasi yang konsisten. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kebijakan lingkungan di tingkat daerah, tetapi juga menawarkan kerangka acuan bagi perbaikan tata kelola sungai yang berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam formulasi kebijakan pengendalian pencemaran sungai, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan teknis bagi aparatur terkait pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan kualitas air, dan penegakan hukum lingkungan. Pembentukan unit khusus yang menangani pengendalian pencemaran sungai dengan sumber daya memadai akan membantu optimalisasi kinerja.

2. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor

Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar dinas terkait (Lingkungan Hidup, PUPR, Kesehatan, Perindustrian) melalui pembentukan tim terpadu. Penyusunan peraturan daerah yang

mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas akan meminimalisasi tumpang tindih kewenangan.

3. Optimalisasi Partisipasi Publik

Pemerintah daerah perlu mengembangkan model partisipasi masyarakat yang lebih substansial, tidak hanya bersifat formalitas. Mekanisme seperti pelibatan komunitas dalam pemantauan kualitas air (citizen science), forum konsultasi publik berkala, dan pengaduan berbasis digital dapat meningkatkan keterlibatan warga.

4. Penegakan Hukum yang Konsisten

Diperlukan penegakan regulasi yang lebih tegas terhadap pelaku pencemaran melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Penerapan sistem insentif-disinsentif bagi industri patuh aturan dapat menjadi alternatif kebijakan.

5. Pengembangan Sistem Pemantauan Terpadu

Investasi dalam teknologi pemantauan kualitas air real-time berbasis IoT perlu dipertimbangkan untuk memperkuat sistem pengawasan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan metode pengendalian pencemaran inovatif juga direkomendasikan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. and Dewata, I. (2018) 'Studi kapasitas beban pencemaran sungai berdasarkan parameter organik (BOD , COD dan TSS) di Batang Lembang Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat', *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 2(1), pp. 76–87.
- Djoharam, V., Riani, E. and Yani, M. (2018) 'ANALISIS KUALITAS AIR DAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN SUNGAI PESANGGRAHAN DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA', *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(1), pp. 127–133. doi: 10.29244/jpsl.8.1.127-133.
- Erliza, A. et al. (2019) 'Identifikasi Pencemaran Air Di Sepanjang Aliran Sungai Utama DAS Batang Arau Kota Padang', *Jurnal Kapital Selektif Geografi*, 2(5), pp. 29–34. Available at: <http://ksgeo.ppj.unp.ac.id/index.php/ksgeo/article/view/239/158>.
- Estika, N., Suprihatin and Yani, M. (2017) 'ANALISIS DAN FORMULASI STRATEGI KETERSEDIAAN AIR BERSIH DI LOKASI TRANSMIGRASI (STUDI KASUS: KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON)', *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 7(2), pp. 114–121. doi: 10.19081/jpsl.2017.7.2.114.
- Fadjarajani, S., Singkawijaya, E. B. and Indriane, T. (2018) 'Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Sungai Cimulu di Kota Tasikmalaya', in *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX*. Surakarta, pp. 248–254.